

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2011, Timur Tengah mengalami era yang disebut *Arab Spring* (Musim Semi Arab). Era tersebut merupakan serangkaian protes yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara guna memprotes rezim yang berkuasa pada saat itu. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Mesir, Suriah, Yaman, Bahrain, Tunisia, Libya, Aljazair, dan negara-negara Arab lainnya. Tujuan dari adanya serangkaian protes tersebut merupakan penyampaian ketidakpuasan masyarakat setempat atas kediktatoran pemimpin pada masing-masing negara tersebut yang justru menghasilkan tindak kekerasan dan kebrutalan oleh aktor-aktor yang terlibat, baik dari pihak demonstran maupun militer di bawah naungan rezim berkuasa.

Penyebab dari timbulnya *Arab Spring* di negara-negara yang telah disebutkan di atas hampir seluruhnya memiliki motif yang sama, seperti rezim pemerintahan yang melakukan tindakan korupsi, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut telah membuat masyarakat merasa geram sehingga menuntut adanya perubahan rezim yang berkuasa. Mereka mendengungkan sebuah slogan politik yang berbunyi *as-sya'b yurid isqat an-nidzam* yang memiliki makna yakni “rakyat ingin menumbangkan rezim ini”. Slogan politik tersebut didengungkan oleh para demonstran ketika menyampaikan protes di kota-kota besar pada masing-masing negara atau menuliskannya dengan sebuah grafiti.

Suriah menjadi salah satu negara yang tersulut kobaran semangat api dari fenomena *Arab Spring*. Masyarakat sipil Suriah turut mencoba melakukan serangkaian protes terhadap pemimpin mereka yakni Presiden Bashar Al-Assad. Bashar Al-Assad telah memimpin Suriah lebih dari satu dekade. Ia melanjutkan estafet kepemimpinan ayahnya yakni Hafez Al-

Assad yang juga merupakan mantan Presiden Suriah selama tiga dekade. Meski sejatinya, kepemimpinan tersebut hendak dilimpahkan kepada Basil Al-Assad yang tak lain adalah saudara kandung Bashar Al-Assad. Namun, Basil Al-Assad meninggal dalam sebuah kecelakaan sehingga Bashar Al-Assad dipersiapkan untuk mengambil alih kekuasaan ayahnya di kemudian hari.

Setelah ayahnya meninggal pada tahun 2000 silam, kepemimpinan berada di tangan Bashar Al-Assad. Selama Bashar Al-Assad memimpin Suriah, terdapat tindakan pejabat pemerintahan yang korup, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh, para remaja yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh oleh pasukan Bashar Al-Assad karena menuliskan sebuah grafiti anti-pemerintah semasa Musim Semi Arab. Semenjak saat itu, rezim pemerintah bertindak represif terhadap masyarakat sipil Suriah yang melakukan aksi protes. Ditambah lagi, serangan-serangan rudal dan zat kimia berbahaya kerap kali diluncurkan oleh rezim Bashar Al-Assad telah memakan banyak korban. Tak mengherankan apabila timbul semacam pro dan kontra diantara masyarakatnya selama masa kepemimpinan Bashar Al-Assad tersebut.

Akibat yang ditimbulkan atas kekejaman rezim Suriah di bawah kepemimpinan Bashar Al-Assad kepada masyarakatnya, membuat banyak diantara mereka enggan untuk tinggal di negerinya sendiri dan melarikan diri ke tempat lain. Penyerangan rezim Suriah dengan berbagai macam cara seperti halnya pengeboman tidak hanya membunuh warga sipil, melainkan merusak berbagai fasilitas seperti rumah sakit dan sekolah-sekolah.

Tidak hanya memancing amarah dan kegeraman dari masyarakat sipil, tindakan Assad tersebut telah memancing kemarahan pihak oposisi pemerintah. Lebih jauh, sejak kemunculan ISIS sebagai kelompok islamis radikal, telah menambah pelik konflik di Suriah. ISIS turut serta memporakporandakan beberapa wilayah. Berbagai situs sejarah peninggalan zaman romawi, makam Nabi Yunus, bahkan beberapa masjid menjadi target ISIS untuk diluluhlantakkan (He, 2015, hal. 17-18).

Keadaan tersebut telah mendorong masyarakat Suriah melarikan diri ke tempat yang dirasa lebih aman dan menjadi pengungsi. Istilah pengungsi menurut *The United Nations High Commissioner on Refugees* (UNHCR) merupakan seseorang atau orang-orang yang melarikan diri dari negara asal mereka karena takut dianiaya dengan berbagai alasan seperti ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan grup sosial tertentu atau perbedaan opini politik (Rosenberg, 2017).

Mayoritas masyarakat Suriah melarikan diri dengan berjalan kaki menembus perbatasan negara lain maupun menyebrangi lautan menggunakan kapal. Mereka berusaha mencapai negara-negara yang jauh lebih aman dibandingkan dengan tempat sebelumnya mereka tinggal. Tak jarang, beberapa orang tewas sebelum menginjak tempat tujuan. Hal itu sering kali disebabkan oleh rasa lelah dan lapar selama perjalanan. Para pengungsi tersebut membawa persediaan makanan yang jumlahnya terbatas.

Salah satu negara yang menjadi destinasi para pengungsi Suriah adalah Turki. Turki merupakan negara yang terletak di sebelah tenggara Eropa dan barat daya Asia. Turki memiliki beberapa wilayah yang terletak di benua Eropa serta Asia. Sehingga masyarakat internasional menyebut Turki sebagai negeri dua benua. Penduduk Turki berkisar 81 juta jiwa (World Population Review, 2018). Pertumbuhan populasi di Turki diperkirakan akan terus meningkat beberapa tahun ke depan. Kedatangan pengungsi Suriah turut memainkan peran dalam peningkatan jumlah populasi tersebut.

Secara geografis, Turki adalah salah satu negara yang berbatasan dengan Suriah di sebelah utara sehingga memungkinkan masyarakat Suriah menetapkan Turki sebagai tujuan melarikan diri karena jaraknya yang cukup dekat. Kota-kota di perbatasan Turki dan Suriah seperti kota Gaziantep, Hatay, Sanliurfa, dan beberapa kota lainnya di Turki menjadi kota yang dipilih pemerintah Turki untuk didirikan kamp-kamp bagi para pengungsi karena dekat dengan perbatasan Suriah. Berikut merupakan gambar peta perbatasan Turki dan Suriah.

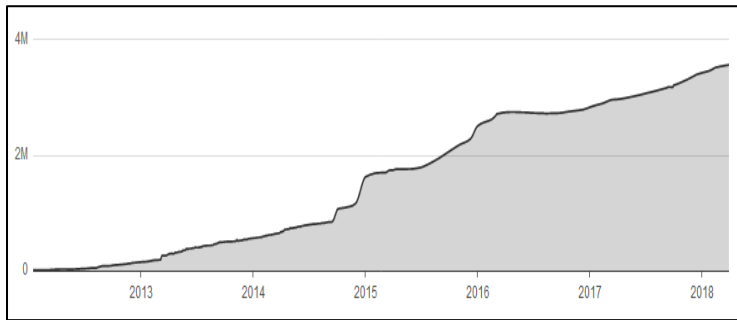
Gambar 1.1
Peta Perbatasan Turki dan Suriah



Sumber: Maps of World, 2017

Selain untuk ditinggali, hingga saat ini Turki juga dijadikan tempat transit para pengungsi ke negara-negara Eropa seperti Jerman dan lain sebagainya. Namun, sejauh ini Turki menjadi salah satu negara yang paling banyak menerima para pengungsi Suriah. Terhitung sejak konflik Suriah meletus hingga 19 April 2018 pengungsi Suriah yang telah teregistrasi oleh Pemerintah Turki mencapai angka 3.584.179 jiwa (Syria Regional Refugee Response, 2018). Jumlah tersebut terus meningkat setiap tahun seperti yang digambarkan oleh grafik berikut ini.

Grafik 1.1
Peningkatan pengungsi Suriah di Turki



Sumber: Syria Regional Refugee Response, 2018

Peningkatan jumlah pengungsi Suriah tersebut mendorong Pemerintah Turki untuk bertindak dengan cepat dan tepat. Pemerintah Turki yang dipimpin oleh presiden terpilih Recep Tayyip Erdogan membuka pintu bagi pengungsi Suriah untuk masuk ke wilayah Turki melalui pintu perbatasan. Pemerintah Turki menetapkan suatu kebijakan yang disebut *open door policy*. Menurut Cambridge Dictionary, *open door policy* merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu negara untuk menerima individu-individu maupun kelompok dari berbagai bangsa maupun etnis di luar negaranya untuk tinggal di negara tersebut, bekerja, ataupun tujuan yang lainnya (Cambridge Dictionary, 2017).

Kebijakan *open door policy* telah diberlakukan sejak 2011 silam (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2016). Pemerintah menempatkan para pengungsi Suriah yang tersebar di 10 provinsi yakni Istanbul, Sanliurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Bursa, Izmir, dan Mardin (International Crisis Group, 2016). Kebijakan tersebut didukung oleh berbagai pihak pemerintahan serta organisasi-organisasi non-pemerintah di Turki.

Menyadari betapa besar dampak atas konflik yang terjadi di Suriah, Pemerintah Turki segera membuat beberapa regulasi untuk pengungsi Suriah. Diantaranya adalah

memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak pengungsi Suriah. Pemerintah Turki memberi kesempatan kepada orang tua agar mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah sementara yang telah disiapkan pemerintah yakni *Temporary Education Centres* (TECs).

Tidak hanya itu, Pemerintah Turki juga mengizinkan anak-anak pengungsi Suriah untuk mendaftarkan diri di sekolah-sekolah negeri. Dengan demikian, anak-anak tersebut diharapkan dapat membaur dengan pelajar Turki dan dapat mempelajari bahasa Turki untuk digunakan sehari-hari. Beberapa NGO, masyarakat Turki, serta Lembaga Pelatihan Bahasa berinisiasi pula untuk mengajar anak-anak pengungsi Suriah yang tidak mendaftar di sekolah-sekolah formal (International Crisis Group, 2016).

Selain akses pendidikan, Pemerintah Turki berupaya membuka kesempatan kerja dengan memberikan perizinan kerja bagi pengungsi Suriah guna meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah Turki memberi izin kerja dengan memetakan terlebih dahulu kualifikasi serta kemampuan dari para pengungsi tersebut agar kemudian dapat diarahkan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kedua hal tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, Pemerintah juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para pengungsi Suriah (World Humanitarian Summit, 2016).

Bertolak belakang dengan Turki, negara-negara di Eropa maupun negara teluk bersikap enggan untuk menerima pengungsi Suriah. Diantara negara tersebut antara lain: Arab Saudi, Hungaria, Republik Ceko, dan lain sebagainya. Arab Saudi yang notabene negara yang memiliki pengaruh kuat di Timur Tengah justru enggan menerima pengungsi Suriah masuk ke dalam wilayahnya. Meski demikian, Pemerintah Arab Saudi mengaku telah memberikan donasi terhadap pengungsi Suriah. Donasi tersebut berbentuk uang dan makanan.

Untuk membantu pengungsi Suriah akibat konflik perang saudara tersebut, Arab Saudi memberikan 508 juta US Dollar. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan Inggris yang memberikan donasi mencapai 1,3 milyar US Dollar

(Akbar, 2015). Bahkan di suatu media massa disebutkan bahwa belum lama ini Arab Saudi mendirikan pagar kawat berduri di sepanjang perbatasannya ke Irak yang juga dijaga pasukan bersenjata, dengan alasan mencegah penyusupan ISIS ke wilayahnya. Namun para pengamat menilai, pagar ini dibuat sebagai salah satu upaya mencegah masuknya pengungsi Suriah (Deutsche Welle, 2015).

Hungaria menjadi salah satu negara di Eropa yang menolak dengan tegas kedatangan pengungsi Suriah. Lebih jauh, Hungaria telah melakukan referendum dan menghasilkan penolakan atas kuota wajib bagi pengungsi yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Sebanyak 73% menolak referendum tersebut (Bayer, 2016). Republik Ceko merupakan negara yang mengikuti jejak Hungaria dalam menolak kuota wajib penerimaan pengungsi yang dicanangkan Uni Eropa tersebut. Jumlah kuota tersebut yakni sebanyak 120.000 orang setiap negara (European Commission, 2015). Republik Ceko diberitakan telah memenjarakan para pengungsi yang secara ilegal memasuki negara ini. Bahkan hal tersebut telah dibenarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Ceko guna menekan laju pengungsi yang datang kesana (Willoughby, 2015).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang “Mengapa Rezim Erdogan mengambil kebijakan *open door policy* terhadap pengungsi Suriah?”.

C. Kerangka Berpikir

1. Konsep Neo-Ottomanisme

Menurut Omer Taspinar dalam tulisannya yang bertajuk *Turkey's Middle East Policies: Between Neo-Ottomanism and Kemalism*, terdapat tiga indikator untuk mendefinisikan konsep Neo-Ottomanisme. Pertama, adanya keinginan untuk mengulang kejayaan sebagaimana pada masa Turki Utsmani dengan warisan nilai-nilai Islam di dalam maupun luar negeri. Neo-Ottomanisme bukanlah sebuah paham yang ingin

merubah Turki modern seperti sekarang ini menjadi negara yang memiliki sistem hukum Islam seperti yang dilakukan Turki Usmani terdahulu. Sebaliknya, Neo-Ottomanisme tetap melanjutkan kebijakan Turki dengan sistem Islam yang moderat dan sekuler pada kebijakan domestik, sedangkan menerapkan kebijakan yang lebih aktif terhadap permasalahan-permasalahan global.

Turki menggunakan *soft power* dalam menanamkan pengaruhnya baik dalam aspek politik, ekonomi, diplomasi, maupun budaya. Tidak mengherankan apabila Turki terbuka terhadap konsep kewarganegaraan yang multietnis. Hal itu terlihat dengan kebijakan domestik Turki terhadap etnis Kurdi yang tidak represif selama etnis Kurdi pun bekerja sama untuk menjaga loyalitas terhadap negara (Taşpınar, 2008, hal. 14-15). Begitu juga dalam hal ini, Turki terbuka dengan kehadiran pengungsi dari Suriah.

Kedua, adanya rasa kepercayaan diri yang kuat dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Turki. Neo-Ottomanisme melihat bahwa Turki memiliki kekuatan secara regional untuk dapat memainkan peran yang penting dalam aspek ekonomi, politik, dan budaya dengan jangkauan yang lebih luas sebagaimana kerajaan Turki Utsmani yang menjadi salah satu pusat peradaban dunia pada zamannya. Kemalisme (ideologi yang diusung oleh Mustafa Kemal) cenderung menganggap Neo-Ottomanisme membahayakan kepentingan nasional Turki khususnya dalam melebarkan sayap terhadap Timur Tengah dan Asia Tengah, dimana diketahui bahwasanya Kemalisme lebih mencondongkan diri terhadap negara-negara Barat (Taşpınar, 2008, hal. 15).

Ketiga, Neo-Ottomanisme ingin merangkul Barat sebagaimana ia merangkul dunia Islam seperti yang terlihat saat ini. Omer Taşpınar berpendapat bahwa konsep Neo-Ottomanisme dianalogikan seperti Dewa Janus dalam mitologi Romawi yang berwajah ganda. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai penghadapan pada sesuatu yang kontras atau menghadapi dua polaritas

yang berbeda (Collins English Dictionary, 2012). Lebih jauh lagi, julukan yang diberikan kepada Turki sebagai *the sick man of Europe*, menjadi salah satu alasan kuat guna menyepakati bahwa Turki juga bagian dari Eropa (Barat). Neo-Ottomanisme ingin menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap Barat begitu pun dengan pengaruh politik, dan warisan-warisan Barat sebagaimana Neo-Ottomanisme ingin memosisikan Turki yang juga dekat dengan dunia Islam (Taşpinar, 2008, hal. 15-16).

2. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme muncul menjadi salah satu teori dalam hubungan internasional setelah terjadi perdebatan antara teori-teori mainstream sebelumnya yakni antara kutub rasionalis-positivis yang terdiri dari realisme, liberalisme, dan lain sebagainya, melawan kutub reflektivis-pospositivis yang terdiri dari teori feminisme, teori kritis, teori normatif, serta teori-teori lainnya.

Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang muncul setelah berakhirnya Perang Dingin (Reus-Smit, 2005, hal. 194). Teori ini lahir sebagai alternatif dari teori hubungan internasional sebelumnya yang dianggap belum mampu menjelaskan fenomena berakhirnya Perang Dingin dengan tepat. Pemikiran kunci konstruktivisme yakni bahwa dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya (*given*) (Robert Jackson, 2016, hal. 365).

Perlu diketahui pula bahwasanya konstruktivisme memiliki beberapa tema atau kajian secara ideasional yang belum pernah dibawakan oleh teoritis-teoritis sebelumnya, sebagaimana yang dikaji oleh Alexander Wendt mengenai identitas. Ada yang memfokuskan kajiannya pada *rules* dan *speech act* sebagaimana Nicholas Onuf, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink yang menganalisis produksi, reproduksi, dan pengaruh norma (*norms*) dalam hubungan internasional, John Gerard Guggie menganalisis mengenai proses

perubahan sistem internasional, sementara Cynthia Weber mengkaji mengenai kedaulatan (*sovereignty*), Peter Katzenstein mengkaji identitas, norma, dan sejarah, kemudian ada pula Jim George menganalisis mengenai bahasa, makna, dan ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi tema-tema lainnya (Bilad, 2011, hal. 73).

Peran konstruktivisme dinilai memberikan sumbangsih dalam mewarnai paradigma hubungan internasional. Seperti halnya tema yang dibawa oleh Alexander Wendt mengenai identitas. Konstruktivisme dinilai mampu membawa kembali aspek-aspek sosial, sejarah, dan norma dalam hubungan internasional. Konstruktivisme dapat menunjukkan tentang bagaimana norma internasional berkembang, pengaruh ide dan nilai yang dapat membentuk kebijakan suatu negara, dan pengaruh identitas terhadap agen dan agensi (Reus-Smit, 2005, hal. 207).

Asumsi dasar Wendt mengenai identitas adalah bahwa "*identities are the basis of interest*" (Wendt, 1992, hal. 398), yakni berkenaan mengenai identitas merupakan landasan dasar perilaku aktor dalam hubungan internasional sebelum adanya kepentingan nasional. Adapun kepentingan nasional merupakan hasil daripada identitas itu sendiri. Negara akan menjunjung tinggi kepentingan nasionalnya ketika negara tersebut telah mengetahui mengenai apa yang telah terdapat dalam dirinya dan apa saja yang harus dicapai oleh negara (Febriliansari, 2017). Hal tersebut tergambar dalam bagan di bawah ini.

Bagan 1.1
Proses Pembentukan Kebijakan dalam
Pendekatan Konstruktivisme (Alexander Wendt)



Bagan tersebut menunjukkan bagaimana identitas lebih dulu membentuk kepentingan nasional suatu negara. Bagan tersebut juga menekankan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kaum neo-realis dan neo-liberal dengan konstruktivis. Pandangan neo-realis dan neo-liberal adalah bahwasanya kepentingan nasional merupakan tenaga penggerak dalam politik internasional (Robert Jackson, 2016, hal. 372) yang melandasi agen (aktor) dalam bertindak. Tidak hanya kepentingan nasional, kaum neo-realis dan neo-liberal juga menekankan adanya kekuasaan (*power*) sebagai landasan bertindak, baik kemampuan ekonomi maupun militer. Dalam hal ini dapat digaris bawahi bahwa neo-realis dan neo-liberal lebih memperhatikan struktur material dalam membentuk realitas sosial dan mengesampingkan ide (struktur ideasional).

Sedangkan menurut pandangan konstruktivis, struktur ideasional memegang peranan penting yang menuntun aktor dalam bertindak. Struktur ideasional tersebut dapat berupa ide, norma, nilai, agama/kepercayaan, sejarah, dan lain sebagainya. Struktur ideasional tersebut akan membentuk sebuah identitas yang digunakan oleh agen (aktor) dalam menentukan kepentingannya, kemudian melahirkan tindakan aktor dalam hubungan internasional. Dengan demikian, identitas menjadi faktor penjelas bagi aktor dalam menentukan perannya dalam urusan global.

Di samping itu, Wendt juga mengkritik asumsi neo-realisme yang mengklaim bahwa identitas dan kepentingan juga merupakan sesuatu yang ada begitu saja. Merujuk pada pandangan Wendt, identitas dapat dikembangkan, ditransformasikan secara terus menerus melalui interaksi (Zehfuss, 2002, hal. 38). Selain identitas dan kepentingan, elemen penting dalam konstruktivisme adalah agen, struktur, dan aksi. Keseluruhan elemen tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam pembentukan realitas sosial yang ada (Susmita, 2013).

Identitas suatu negara, kelompok masyarakat, maupun individu mempunyai ciri khas yang dapat membedakan satu sama lain. Dalam konteks negara, identitas biasanya merujuk pada serangkaian sejarah yang dimiliki negara pada masa lampau yang didasari oleh nilai-nilai tertentu yang dianut sebagai pedoman atau panduan dalam bersikap dan bertindak.

Sebagaimana Turki, negara dua benua ini memiliki sejarah panjang pada masa Turki Utsmani dahulu. Keadaan tersebut membuat Turki saat ini memiliki nilai-nilai yang telah terinternalisasi ke dalam masyarakatnya. Meskipun demikian, agen (aktor) dalam pandangan konstruktivis pada dasarnya juga memiliki peranan dalam mengubah struktur yang membentuk tindakan atau kebijakan negara. Dalam hal ini Turki pernah memiliki sejarah pada masa lampau dengan eksistensi Turki Usmani yang berhasil mencapai kegemilangan dengan nilai-nilai Islam (sufisme) yang melekat guna mengantarkan Turki Usmani pada saat itu sebagai pemimpin dunia Islam.

Sejarah juga mencatat mengenai Turki Usmani yang menjadi salah satu peradaban yang paling berpengaruh di dunia apabila dibandingkan dengan peradaban-peradaban lain pada abad pertengahan. Para pemimpin Turki Usmani menggunakan struktur ideasional yakni nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam menentukan kepentingan Turki Usmani sebagai

pemimpin dunia Islam. Kemudian setelah mengetahui identitasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam (sufisme), Turki Usmani melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan dengan identitas dan kepentingannya. Seperti menciptakan perdamaian dan melindungi Muslim yang tertindas. Secara singkat identitas yang digunakan pada masa Turki Usmani dapat disebut dengan Sufisme atau Ottomanisme.

Kemudian setelah Turki Usmani runtuh pada tahun 1923 silam dan digantikan dengan Republik Turki yang prakarsai oleh Mustafa Kemal Pasha yang digelar dengan Atatürk (Bapak Bangsa Turki), Turki mengubah identitas sebelumnya yakni Sufisme atau Ottomanisme menjadi Kemalisme dengan mengedepankan nilai-nilai sekulerisme terhadap masyarakatnya.

Dengan adanya sekulerisme tersebut, membuat kepentingan Turki juga berubah. Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal ingin menjadikan Turki sebagai negara maju dan mencondongkan diri dengan negara-negara Barat. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pemerintahan Mustafa Kemal pada saat itu baik domestik maupun luar negeri berbeda dengan Turki Usmani. Sebagai misal kebijakan domestik Republik Turki modern terhadap masyarakatnya dalam hal berpakaian yang diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan negara-negara Barat. Kebijakan luar negeri Turki pada era Mustafa Kemal juga lebih dekat dengan Barat dan mengabaikan hubungannya dengan dunia Islam.

Setelah hampir satu abad lamanya berada di bawah payung sekulerisme, pada akhir abad 20 secara perlahan Turki berusaha memunculkan kembali nilai-nilai Islam yang diimplementasikan oleh Turki Usmani dahulu. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyak muncul partai-partai Islam yang mewarnai jagad perpolitikan Turki. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Politik Islam Turki yakni Necmettin Erbakan

yang berusaha mendirikan partai-partai berbasis Islam. Misalnya, ketika Erbakan mendirikan *National Order Party*, *National Salvation Party*, *Welfare Party*, *Virtue Party*, dan lainnya. Namun, partai-partai tersebut acapkali dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada saat itu karena dianggap anti-sekulerisme.

Pada 14 Agustus 2001, muncul kembali partai berbasis Islam dalam kancah perpolitikan Turki yakni Partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*). Pendiri Partai AKP adalah Abdullah Gul dan Recep Tayyip Erdogan. Partai ini berusaha mengembalikan nilai-nilai Islam yang dianut Turki Usmani dengan segala kegemilangan yang berhasil ditorehkan dengan pengaplikasian nilai-nilai Islam tersebut dalam kebijakan Turki, baik domestik maupun luar negeri yang disebut dengan Neo-Ottomanisme. Neo-Ottomanisme digunakan oleh Turki khususnya dalam hal ini adalah di bawah naungan Presiden Erdogan untuk menentukan kepentingan nasionalnya sebagai pemimpin dunia Islam yang kemudian dituangkan melalui kebijakan-kebijakan domestik dan luar negeri Turki.

Kepentingan tersebut mengantarkan Turki pada peranan yang besar khususnya tanggung jawab untuk melindungi dunia Islam yang disesuaikan dengan fenomena internasional saat ini. Sebagaimana peranan Turki dalam mengatasi konflik yang terjadi di Suriah. Merujuk kepentingan Turki saat ini, rezim Turki di bawah Presiden Erdogan merasa perlu membantu melindungi Suriah. Salah satunya yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni mengenai kebijakan luar negeri Turki terhadap pengungsi Suriah dengan mengimplementasikan kebijakan *open door policy*.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori tersebut, maka dapat ditarik suatu hipotesis bahwa Turki membuat kebijakan *open door policy* bagi pengungsi Suriah karena identitas Turki yakni Neo-Ottomanisme dimana Turki ingin

menjadi negara yang kuat dan berpengaruh di dunia sebagaimana kerajaan Turki Utsmani terdahulu yang mengedepankan nilai-nilai Islam (sufisme) dengan menjadi pemimpin dunia Islam.

E. Metode Penelitian

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui metode berbasis dokumen serta internet guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tingkat Analisa

Penentuan tingkat analisa dalam penulisan skripsi ini akan memudahkan serta mengerucutkan subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, unit analisa adalah Pemerintah Turki (Rezim Erdogan) sebagai subjek yang perilakunya akan dianalisa (variabel dependen). Kemudian unit eksplanasi adalah Pengungsi Suriah sebagai objek yang akan memengaruhi perilaku subjek (variabel independen).

2. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang secara umum merujuk pada pengumpulan data dan strategi atau teknik analisis data, yang bergantung pada data non-numerik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai fenomena, aktivitas-aktivitas, dan proses-proses sosial (Bakry, 2017, hal. 63-64).

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yakni data atau dokumen yang merujuk pada data primer. Menurut Kenneth D. Bailey dalam bukunya yang berjudul *Methods of Sosial Research* data sekunder merupakan data yang diperoleh dari orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca data primer (Bakry, 2017, hal. 68-69). Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam skripsi ini berasal dari dokumen-dokumen atau arsip, buku, serta internet seperti situs berita yang tersedia

secara bebas, artikel jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang dapat diakses serta terkait dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang merujuk pada data-data sekunder, maka pencarian data dalam penulisan penelitian ini difokuskan pada data-data pustaka. Data pustaka akan penulis seleksi, analisis, dan dibatasi sesuai dengan data yang memiliki korelasi dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan variabel-variabelnya. Di dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dijadikan pembanding adalah negara-negara Eropa dan negara Teluk (Hungaria, Republik Ceko, Arab Saudi, dan lain-lain).

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena dalam hubungan internasional
2. Untuk mengetahui kebijakan luar negeri Turki terhadap pengungsi Suriah
3. Untuk menjelaskan pengaruh identitas Turki terhadap Kebijakan Luar Negeri Turki

G. Jangkauan Penelitian

Dalam menganalisis kebijakan *open door policy*, penulis mengerucutkan batasan waktu pada era kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan sedari 2014 hingga saat ini. Namun, dalam penulisan skripsi ini akan melakukan kilas balik untuk mengupas dari segi historis adanya kejayaan Turki Usmani, berdirinya Republik Turki, hingga munculnya upaya-upaya mengembalikan identitas Turki (Neo-Ottomanisme). Negara-negara yang menjadi fokus utama dalam penulisan skripsi ini adalah Turki dan Suriah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I memaparkan garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II memaparkan mengenai dinamika perkembangan pengungsi Suriah yang diawali dengan Arab Spring dan sejarah konflik Suriah, dampak konflik Suriah, problematika yang dihadapi pengungsi Suriah, serta upaya-upaya yang telah dilakukan organisasi seperti Liga Arab, Uni Eropa, dan PBB dalam mengatasi krisis pengungsi Suriah tersebut.

BAB III membahas mengenai kebijakan *open door policy* yang melingkupi regulasi-regulasi yang telah dirumuskan Pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk menangani pengungsi Suriah di Turki.

BAB IV membahas secara ringkas mengenai identitas Turki Usmani, dilanjutkan dengan sejarah singkat berdirinya Republik Turki yang kental dengan nilai-nilai sekulerisme (Kemalisme), kemudian akan dilanjutkan dengan Neo-Ottomanisme sebagai identitas Turki dalam merumuskan kebijakan luar negeri, serta proses perkembangan konsep tersebut.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi penutup dan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.